

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan selama Praktek Kerja Profesi (PKPA) yang telah dilakukan di Apotek Kimia Farma No. 304 adalah sebagai berikut :

- a. Calon Apoteker sebaiknya diberi kesempatan untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di Apotek dengan bimbingan dari Apoteker Penanggung Jawab atau Apoteker Praktek, agar calon Apoteker dapat memperoleh wawasan mengenai keadaan di lapangan yang sebenarnya
- b. Calon Apoteker sebaiknya meningkatkan pemahaman mengenai obat – obat agar mampu memberikan pelayanan kefarmasian seperti pelayanan konseling dengan baik dan jelas.
- c. Pemantauan terhadap kondisi pasien seperti *Homecare*, *PMR* dapat ditingkatkan lagi, agar pasien merasa lebih dipedulikan sehingga peran dan fungsi Apoteker di masyarakat bisa lebih dirasakan
- d. Calon Apoteker harus melatih diri untuk bisa peduli, berempati agar pelayanan kefarmasian dapat berjalan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2006, Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hipertensi, Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik DITJEN Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

BPOM RI., 2005, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.

BPOM RI., 2016, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Obat – obat Tertentu yang Sering di Salah Gunakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. 2006. Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas. Departemen Kesehatan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2012. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.

Johnstone, A, 2005. Gout: The Disease and Non-Drug Treatment. Hospital Pharmacist, 12: 391-393.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/ Menkes/ Per/ X/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 889/ Menkes/ Per /V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan: Jakarta.

Lacy, C.F. *et al.* 2009. Drug Information Handbook 17TH Edition. American Pharmacist Association, USA.

Munazir, Z dan Helmy, M., 2007. Pemakaian Cetirizine dan Kortikosteroid pada Penyakit Alergi Anak. *Dexa Media*, 20: 68 – 73.

McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.

Menteri Kesehatan RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta

Menteri Kesehatan RI, 2010, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/ MENKES/ 159/ 2010 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Kesehatan Pemerintah. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

Menteri Kesehatan RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Menteri Kesehatan: Jakarta.

MIMS Indonesia, 2016. MIMS Petunjuk Konsultasi ed.3, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Menteri Kesehatan RI, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, Menteri Kesehatan; Jakarta.

Menteri Kesehatan RI, 2011, Menteri Kesehatan RI No. 889/ Menkes/ Per/ V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan: Jakarta.

Menteri Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan: Jakarta.

Menteri Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan; Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta.

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, Manajemen Farmasi ed. 3, Airlangga University Press, Surabaya.

Sweetman, S.C., 2009, Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed., Pharmaceutical Press, London.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Jakarta.